

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikan nila salin (*Oreochromis niloticus*) merupakan salah satu ikan yang termasuk dalam komoditas unggulan perikanan dengan tingkat konsumsi yang tinggi, maka dengan itu produktifitasnya perlu ditingkatkan dengan penambahan teknologi akuakultur dan sistem intensif agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ikan ini termasuk dalam 5 komoditas unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa beberapa jenis komoditas seperti udang, kepiting, lobster, rumput laut, dan ikan nila telah diintroduksi ke Indonesia dalam beberapa tahap (Saputry & Latuconsina, 2022). Meskipun demikian, ikan nila dengan cepat beradaptasi, menyebar ke seluruh wilayah, dan menjadi salah satu ikan konsumsi yang sangat populer. Kepopulerannya membuat ikan nila kini mudah ditemukan. Berdasarkan data BPS tahun 2018, produksi ikan nila mencapai 1.171.699 ton dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 1.374.230 ton (Zulendra & Sektiana, 2022). Di tahun 2021 produksi ikan nila menurun menjadi 1,35 juta ton dengan nilai Rp. 33,63 triliun (Agustina *et al.*, 2024) Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) secara resmi didatangkan ke Indonesia oleh Balai Penelitian Air Tawar pada tahun 1969 (Dewi *et al.*, 2018). Budidaya ikan nila mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1970-an. Seiring dengan perkembangan teknologi budidaya, berbagai penelitian terus dilakukan untuk menghasilkan varietas ikan nila yang lebih unggul (Ulnang, 2012).

Ikan nila memiliki banyak keunggulan untuk dibudidayakan karena sifat biologisnya, seperti pertumbuhan yang cepat serta kemampuan menjadi omnivora, memakan daging dan tumbuhan (Susantie & Manurung, 2021). Belakangan ini, budidaya ikan nila telah berkembang hingga perairan payau dan laut, dikenal dengan budidaya nila salin. Saat ini, kebutuhan benih untuk budidaya nila salin sebagian besar masih dipasok dari pembenihan di air tawar. Namun, benih nila air tawar umumnya memiliki tingkat adaptasi yang rendah ketika dipelihara di tambak air payau atau asin, dengan rata-rata tingkat kelangsungan hidup sekitar 50% (Aliah, 2017).

Permintaan ikan nila yang semakin meningkat mendorong para pembudidaya untuk mengembangkan budidaya ikan nila salin. Namun, kegiatan budidaya nila salin masih menghadapi berbagai tantangan, seperti faktor lingkungan yang tidak stabil, serangan penyakit, pertumbuhan yang lambat, dan kematian massal. Masalah-masalah ini menyebabkan menurunnya tingkat produktivitas budidaya ikan nila salin (Aliah, 2017). Budidaya ikan nila salin berpotensi menghasilkan keuntungan besar jika dikelola dengan baik. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, konsumsi ikan nila secara umum terus meningkat. Provinsi dengan pertumbuhan produksi ikan nila tertinggi pada tahun 2017 adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pertumbuhan sebesar 30,98%.

Permintaan pasar, baik domestik maupun internasional, cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menjadikan usaha budidaya ikan nila memiliki prospek yang cerah sebagai bisnis yang menguntungkan (Akmal et al., 2022) Program pengembangan ikan nila unggul yang dapat hidup di perairan dengan salinitas tinggi dikenal sebagai ikan nila salin. Pengembangan budidaya ikan nila salin perlu ditingkatkan, mengingat ikan ini mampu tumbuh dan berkembang di perairan payau dengan kadar garam lebih dari 20 ppt, bahkan di perairan laut dengan salinitas hingga lebih dari 32 ppt, berkat karakteristik khusus yang dimiliki oleh ikan nila salin (Aliah, 2017). Maka usaha budidaya ikan nila salin perlu dikembangkan dengan sungguh-sungguh karena usaha budidaya ini memiliki prospek yang baik. Pengembangan budidaya ikan nila di perairan payau dengan salinitas tinggi telah menjadi perhatian di berbagai negara, seperti Thailand, Vietnam, Jamaika, Mesir, dan Israel. Di sisi lain, perubahan lingkungan perairan akibat pemanasan global menyebabkan naiknya permukaan air laut, peningkatan salinitas air tanah, serta genangan air laut di lahan persawahan di kawasan pesisir (Rahim et al., 2015)

1.2 Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan harian, tingkat kelulushidupan (SR), nilai FCR, dan biomassa pembesaran ikan nila salin (*Oreochromis niloticus*) di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang, Jawa Barat.

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perkembangan BLUPPB Karawang

Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang awalnya dikenal sebagai Proyek Pengembangan Tambak Inti Rakyat (PP-TIR) berdasarkan KEPRES Nomor 18 Tahun 1984, yang bertujuan untuk menciptakan kawasan percontohan usaha budidaya udang yang maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan untuk memandu pengembangan budidaya udang di Indonesia. Namun, seiring waktu dan Reformasi 1998, manajemen Tambak Pandu TIR mengalami masalah yang menyebabkan berhentinya operasi. Dalam masa sulit tersebut, terjadi penjarahan aset dan perampasan lahan.

Pada 5 Juni 2002, PP-TIR diserahkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia kepada Departemen Kelautan dan Perikanan untuk dijadikan wadah percontohan dan pendampingan teknologi perikanan budidaya. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya 11/DPB.0/1/2006, Kepala Unit Tambak Pandu Karawang (TPK) ditunjuk, dan eks PP-TIR berganti nama menjadi Satker Pengembangan Kawasan TPK.

Tugas utama TPK adalah melaksanakan sebagian dari tugas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, yang meliputi pembinaan, pengembangan, dan pengendalian sistem pembudidayaan perikanan nasional. TPK juga berfungsi sebagai Aquaculture TechnoPark dan inkubator bisnis untuk kegiatan pembinaan perikanan di tingkat nasional.

Memasuki tahun 2009 unit kerja ini telah ditetapkan menjadi Balai Layanan UsahaProduksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang sebagai Unit Pelaksana TeknisDirektorat Jenderal Perikanan Budidaya berdasarkan Kepmen Nomor PER.07/MEN/2009 tanggal 13 Maret 20

2.2 Tugas dan Pokok Fungsi

Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan pengembangan usaha produksi perikanan budidaya melalui pola pengembangan etalase dan inkubator usaha perikanan budidaya. antara lain sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang perekayasaan usaha produksiperikanan budidaya air tawar, budidaya air payau dan laut;
2. Perekayasaan segmentasi dan analisis kelayakan skala usaha pembenihan, pendederan dan pembesaran usaha produksi perikanan budidaya;
3. Percontohan usaha produksi perikanan budidaya dengan penerapan sertifikasi sistem mutu budidaya perikanan;
4. Penerapan tata kelola kawasan usaha, analisis jenis dan tata guna faktor-faktorproduksi perikanan budidaya;
5. Pelayanan sarana produksi hasil produksi satuan kerja;
6. Pelaksanaan rancang bangun konstruksi, peralatan dan mesin sarana budidaya serta analisis laboratorium;
7. Pelaksanaan diseminasi dan pendampingan usaha produksi perikanan budidaya;
8. Pelayanan akses kemitraan usaha produksi perikanan budidaya dan jasa informasi usaha atau perpustakaan;
9. Penyelenggaraan lembaga sertifikasi sistem mutu usaha produksi perikananbudidaya; dan
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2.3 Visi Misi

Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang mempunyai visi yaitu "Menjadikan BLUPPB Karawang sebagai Pusat Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya yang Terkemuka". Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang memiliki misi yaitu "Meningkatkan Produktivitas dan Kualitas Usaha Produksi Perikanan Budidaya yang Berdaya Saing. Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan".

2.4 Letak Geografis dan Topografi

Luas kawasan BLUPPB sekitar 390 ha yang terdiri dari lahan balai seluas 256 ha, tambak atau kolam inti seluas 119 ha, dan sisanya kawasan penyangga, fasilitas perumahan dan kantor serta lahan plasma.

Secara geografis BLUPPB Karawang berbatasan dengan wilayah: 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Pantai Utara Jawa; 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Cimunculak; 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Ciwadas dan 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Cipucuk dan Cikaket.



Gambar 1. letak geografis BLUIPPB

(Sumber : BLUPPB Karawang)

2.5 Stuktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2009 tentang struktur organisasi dan tata kerja BLUPPB Karawang terdiri dari Kepala Balai, Sub bagian Tata Usaha, Seksi Teknik Usaha Produksi, Seksi Sarana Teknik, Seksi Pelayanan Teknik dan Kelompok Fungsional yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok yaitu pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan jasa informasi usaha atau perpustakaan serta pelaporan BLUPPB.

- 2) Seksi Teknik Usaha Produksi mempunyai tugas pokok yaitu melakukan rekayasa segmentasi dan analisis kelayakan skala usaha pembenihan, pendederan dan pembesaran usaha produksi perikanan budidaya serta percontohan usaha produksi dengan penerapan sertifikasi sistem mutu budidaya perikanan.
- 3) Seksi Sarana Teknik mempunyai tugas pokok yaitu penerapan tata kelola kawasan usaha, analisis jenis dan tata guna faktor-faktor produksi perikanan budidaya, pelayanan sarana produksi hasil produksi satuan kerja serta melaksanakan rancang bangun konstruksi, peralatan dan mesin sarana budidaya.
- 4) Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan diseminasi, pendampingan, pelayanan akses kemitraan dan analisis laboratorium usaha produksi perikanan budidaya serta penyelenggaraan lembaga sertifikasi sistem mutu usaha produksi perikanan budidaya.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok yaitu melakukan perekayasaan, pengujian, penerapan dan bimbingan penerapan standar atau sertifikasi sistem mutu usaha produksi perikanan budidaya, pengendalian hama dan penyakit ikan, pengawasan pembenihan dan pembudidayaan, penyuluhan serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6 Ketenagakerjaan

Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang mempunyai pegawai sejumlah 124 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS Penyuluh dan Pegawai Kontrak atau Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada.

Tabel 1 Ketenagakerjaan

NO	Status	Jumlah (orang)
1.	PNS	84
2.	CPNS	7
3.	PNS Penyuluh	2
4.	Tenaga Kerja Kontrak	31
Jumlah		124